



Pemkot Yogya Lanjutkan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta terus menguatkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian warga melalui program Bedah Rumah atau Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sepanjang tahun 2025, sebanyak 67 rumah warga telah diperbaiki melalui berbagai skema pendanaan.

Dari total tersebut, sebanyak 63 kegiatan bedah rumah bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), dua rumah berasal dari swadaya masyarakat, serta dua rumah lainnya dibiayai melalui APBD Kota Yogyakarta untuk penanganan rumah warga yang terdampak musibah kebakaran.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Subarjilan, menjelaskan program RTLH tidak hanya bergantung pada

da pemerintah, tapi juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha. "Dari 67 rumah itu ada yang bersumber dari CSR, ada yang dari swadaya masyarakat, dan ada juga bantuan untuk rumah korban kebakaran. Untuk swadaya masyarakat, dananya murni berasal dari urunan warga," ujar Subarjilan di Komplek Balai Kota, Senin (5/1).

Ia menerangkan, dalam skema swadaya, warga membentuk kepanitiaan secara mandiri di tingkat wilayah atau kelurahan. Tokoh-tokoh masyarakat setempat berinisiatif menggalang donasi dan melaksanakan perbaikan rumah secara gotong royong. "Panitianya dibentuk sendiri oleh masyarakat, dananya dikumpulkan sendiri, dan pengerjaannya juga dilakukan bersama-sama secara gotong royong," jelasnya.

Pada tahun 2025, kegiatan swadaya masyarakat tercatat berlangsung di wilayah Mergangsan dan Ngampilan. Selain itu, terdapat pula bantuan yang berasal dari berbagai pihak yang secara spontan memberikan dukungan kepada warga terdampak.

Lebih lanjut, Subarjilan menyampaikan pola pendanaan program RTLH pada 2026 diperkirakan tetap didominasi oleh CSR. Sejumlah mitra CSR yang selama ini konsisten mendukung antara lain Baznas, Bank BPD DIY, Bank Jogja serta sejumlah perusahaan lainnya. "CSR itu sifatnya dinamis. Kadang tiba-tiba ada perusahaan yang masuk membantu, kemarin dari Pamela mendukung perbaikan 10 rumah, lalu bertambah lagi. Pola seperti itu kemungkinan juga akan terjadi di 2026," ungkapnya.

Terkait mekanisme penentuan sasaran, Pemkot Yogyakarta membentuk Tim Bedah Rumah lintas perangkat daerah yang terdiri dari Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Umum dan Protokol, serta unit terkait lainnya. "Dinas PU bertugas melakukan survei lapangan untuk

memastikan rumah tersebut benar-benar tidak layak huni dan layak dibantu. Sementara koordinasi CSR dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra," jelas Subarjilan.

Pelaksanaan bedah rumah menggunakan model gotong royong, di mana ban-

tuhan dari donatur tidak disalurkan melalui Pemkot, melainkan langsung kepada panitia yang dibentuk di tingkat kelurahan. Pemerintah kota berperan sebagai fasilitator dan koordinator antara wilayah penerima, tim teknis, dan pihak donatur. (*)-d

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Tata Pemerintahan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005